



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.894.618.795.334,39 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Sembilan Sen*) yang berarti 99,91% (*sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.896.276.561.452,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.089.718.217.226,29 (*Dua Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Sembilan Sen*) yang berarti 94,70% (*Sembilan Puluh Empat koma Tujuh Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.584.328.498,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar -Rp195.099.421.891,90 (*Minus Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen*) yang berarti 62,87% (*enam puluh dua koma delapan puluh tujuh persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp310.307.767.046,00 (*Minus Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp312.023.875.190,74 (*Tiga Ratus Dua Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat Sen*);
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp116.924.453.298,84 (*Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen*).

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17